

Judul : Ada temuan fakta polisi langgar HAM di Seruyan
Tanggal : Selasa, 17 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Ada Temuan Fakta Polisi Langgar HAM di Seruyan

TIM Advokasi Solidaritas untuk Masyarakat Adat Bangkal menemukan adanya tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh aparat kepolisian dalam peristiwa Seruyan yang terjadi pada Sabtu (7/10). Komnas HAM didesak memulai penyelidikan melalui pembentukan tim pencari fakta (TPF).

Temuan tersebut tertuang dalam laporan yang dirilis kemarin oleh tim advokasi yang beranggotakan 15 organisasi masyarakat sipil itu. Tergabung dalam tim advokasi antara lain Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara

(PPMAN), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Peristiwa bentrokan pengunjuk rasa dengan aparat yang menelan satu korban jiwa itu terjadi di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng). Direktur Walhi Kalteng Bayu Herinata menerangkan tim menelusuri dan mencari fakta secara langsung pada 9-13 Oktober 2023. Dikatakan Bayu, warga menuntut pemenuhan janji PT Hamparan Masawit Bangun Persada (PT HMBP) untuk

memberikan lahan plasma sawit sejak 16 September. Unjuk rasa terhenti pascaperistiwa 7 Oktober.

"Telah terjadi pengerahan aparat secara berlebihan untuk pembubaran demonstrasi masyarakat Desa Bangkal terhadap PT HMBP," tutur Bayu.

Setidaknya 440 aparat dari Polda Kalteng, Polres Kotawaringin Timur, dan Polres Seruyan dikerahkan ke Desa Bangkal. Tim menemukan fakta polisi menembakkan gas air mata dan peluru pada beberapa kesempatan.

Akibatnya warga terluka serta puluhan ibu dan anak

mengalami trauma. Puncak dari penggunaan senjata secara sewenang-wenang itu ialah penembakan pada 7 Oktober yang menewaskan seorang warga dan mengakibatkan luka tembak serius warga lainnya.

Tim advokasi menilai peristiwa tersebut merupakan bentuk *extrajudicial killing* atau pembunuhan di luar hukum.

"Temuan kami juga menunjukkan adanya warga yang menjadi korban penangkapan, penahanan, dan penyiksaan, serta upaya paksa penyitaan dan penggeledahan sewenang-wenang oleh aparat," ujar Koordinator PPMAN Syamsul

Alam Agus.

Tim advokasi menilai Polda Kalteng, Polres Kotawaringin Timur, dan Polres Seruyan tidak serius menangani kasus Seruyan secara profesional. Oleh karena itu, Mabes Polri, Komnas HAM, LPSK, dan Kompolnas didesak mengusut tuntas.

Di sisi lain, Mabes Polri memutasi Kapolda Kalteng Irfen Nanang Avianto dan Kapolres Seruyan AKB Ampu Mesias Von Bulow. Namun, Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Erlan Munaji menyatakan itu bukan imbas kasus Seruyan, melainkan mutasi biasa untuk bina karier. (DY/Ant/X-10)